

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam berbagai kepustakaan barat, seperti yang dikutip oleh Prof. Miriam Budiardjo¹ dalam bukunya *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, dijelaskan bahwa partai politik pertama-tama lahir di Eropa Barat. Gagasan munculnya partai politik dimulai dari sebuah pandangan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikutsertakan dalam proses politik. Karena itu perlu sebuah wadah yang dapat menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak yang lain.

Secara historis kemunculan partai politik seperti yang ada saat ini tidak seperti dulu. Di Perancis dan Inggris, kegiatan politik bersifat elitis dan aristokratis. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menikmatinya. Mereka yang bisa bergabung adalah para kalangan bangsawan, dan orang-orang kaya, serta segelintir orang yang dianggap memiliki kekuasaan seperti para pendeta.

Secara lambat namun pasti, pada perkembangan selanjutnya, proses politik yang berada dalam parlemen dan hanya dinikmati oleh segelintir golongan tertentu saja mulai meleleh, dan terjadi pergeseran. Masyarakat mulai dilibatkan. Berpuluh-puluh tahun proses ini terjadi. Sampai pada perkembangan selanjutnya, partisipasi politik dengan mendirikan partai politik menjadi subur, dan berkembang pesat.

¹ Miriam Budiardjo, 1992, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, h. 150

Di Barat, selain terdapat parpol lindungan (jenis partai yang tidak memiliki disiplin partai yang ketat) juga terdapat partai yang mengadopsi pandangan hidup tertentu atau ideologi tertentu, seperti Partai Sosialisme, Kristen Demokrat, dan sebagainya.

Dalam konteks Indonesia, partai-partai politik mulai tumbuh pada saat masa kolonial. Kesadaran akan pentingnya memperjuangkan kemerdekaan pada rel politik menjadikan anak bangsa pada saat itu mulai mengubah strategi perjuangannya ke ranah organisasi modern seperti partai politik. Namun perjuangan dalam ranah fisik, seperti mempertahankan sebuah daerah dari kekejaman dan kebrutalan penjajah masih tetap eksis.

Jika kita menurut lintasan sejarah, akan kita dapati bahwa akar geneologi partai-partai Islam di Indonesia, dipelopori oleh Sarekat Islam (SI). Pada awalnya Sarekat Islam bernama Sarekat Dagang Islam (SDI), merupakan perkumpulan bisnis kalangan Bumi Putera dalam mengcounter dominasi pebisnis batik dari etnis Tionghoa. SDI didirikan di Solo pada 1911 oleh H. Samanhudi, seorang saudagar muslim kaya di Surakarta, Jawa Tengah. Dalam perjalanannya, SDI mulai merubah arahnya dari komersial ke bidang politik. Kondisi demikian terjadi pada tahun 1912, ketika SI dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto (1883-1934)².

Organisasi ini berkembang semakin pesat. Sarekat Islam dibawah pimpinan HOS Tjokroaminoto mampu menjadi partai yang populer. Keberhasilan di bidang ini tidak bisa dilepaskan dari kuatnya *image* yang dibentuk oleh SI sebagai pembawa aspirasi Bumi Putera untuk perjuangan kemerdekaan.

Pada tahun 1912 didirikanlah Muhammadiyah oleh Kyai H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Berbeda dengan SI, Muhammadiyah memposisikan diri sebagai organisasi sosial keagamaan. Sepertinya telah terbagi pembagian kerja antara SI dengan Muhammadiyah, dalam membangun masyarakat. Muhammadiyah dibawah kepemimpinan Ahmad Dahlan banyak dipengaruhi oleh ide Abduh. Sedang SI di bawah kepemimpinan Hos Tjokroaminoto banyak dipengaruhi oleh ide Al-Afghani. Muhammadiyah dan SI mempunyai tujuan jangka panjang yang sama, yakni Islamisasi masyarakat dari cara berpikir Barat.

Pada tahun 1914 kelompok Marxis mendirikan ISDV (*Indische Sociaal Democratische Vereeniging*, Organisasi Sosial Demokrat Hindia Belanda). Melalui ISDV ini, pemikiran Marxis disebarkan ke dalam tubuh SI.

Dalam perkembangannya, terjadi perpecahan dalam tubuh partai Sarekat Islam Indonesia. Tokoh SI seperti Semaun, dan Darsono ternyata memilih keluar, dan membentuk partai baru yang bernama Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI didirikan pada tanggal 23 Mei 1920. Terjadinya perpecahan ini, tidak bisa dilepaskan dari peranan Gubernur Jenderal Idenburg yang telah memberikan peluang kepada ideologi baru radikal, Marxisme, untuk melakukan infiltrasi kepada SI melalui cabang-cabang SI di daerah-daerah.

Dalam menghadapi serangan ideologi Marxis, Hos Tjokroaminoto mengajak kader terbaiknya seperti H.A Salim, dan Abdoel Moeis, keduanya dari Sumatera Barat untuk melakukan *counter* ideologi. Keduanya berjuang keras, tapi belum berhasil, karena hanya sedikit intelektual muslim yang bisa membendung dan menangkis perlawanan secara sistematis terhadap serangan ideologi Marxis

Keunggulan PKI dibanding SI adalah pada keterusterangan PKI dalam mengatakan antikolonialisme. Menurut penulis, Hos Tjokroaminoto melakukan sedikit kesalahan, tapi berefek fatal, yakni dengan ungkapan “Kita muslim, jadi kita sosialis”. Menurut penulis ini adalah jawaban apologetik, dan terkesan tidak tegas. Yang perlu dilakukan para tokoh SI seharusnya adalah berteriak lantang mengenai perjuangan antikolonial, bukan malah mengatakan Islam Sosialis.

Pada 1918, H.J.F. Sneevliet, seorang Marxis Belanda diusir dari Indonesia, karena propagandanya tentang perjuangan kelas terus mendapat sambutan hangat dari masyarakat, dan ini dikhawatirkan oleh pihak penjajah. Pada tanggal 23 Mei 1920, ISDV diubah menjadi PKI, dengan SI cabang Semarang sebagai pusatnya. Semaun dipilih menjadi ketuanya, meski secara organisatoris masih menjadi anggota SI. Hal ini disengaja untuk tujuan menarik massa sebanyak mungkin. Cabang-cabang SI mulai di Marxiskan. Mereka yang telah di Marxiskan menyebut dirinya sebagai SI merah’.

Pada tahun 1926 terjadi pemberontakan di Banten dan Silungkang pada tahun 1927 dengan memperalat massa muslim, yang didalangi oleh PKI. Karena rencana pemberontakan tidak *diplanning* dengan sistematis maka pemberontakan mudah dipatahkan oleh pemerintah kolonial. Efek dari pemberontakan tersebut banyak dari pemimpinnya yang dibuang di Tanah Merah, dan PKI dinyatakan sebagai partai terlarang. Semaun dan Darsono, kedua pemimpin PKI lari ke Moskow. Sampai tahun 1945 kegiatan PKI boleh dikatakan absent, tapi Marxisme masih merambat dalam banyak intelektual Indonesia, seperti Soekarno

Pada masa PKI lahir, sampai PKI dicap sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah kolonial, SI masih tetap kalah dalam hal merebut hati masyarakat. Ini bisa menunjukkan bahwa Islam tidak menjadi daya tarik bagi masyarakat. Ketertarikan massa pada SI adalah pada semangat memperjuangkan kemerdekaan. Namun setelah PKI lahir, PKI lebih lantang berteriak, PKI lebih berhasil dalam menggambarkan kemerdekaan, dan mimpi-mimpi kemakmuran.

Pada tanggal 4 Juli 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). PNI secara tegas mengambil sikap radikal dan non kooperatif dengan pemerintah kolonial. Tuntunannya jelas "Kemerdekaan Indonesia". Dengan waktu singkat, banyak orang yang bersimpati kepada PNI. Kehadiran PNI, justeru semakin melemahkan entitas SI. SI seolah kehilangan bidang garap dalam mengeluarkan isu-isu politik. Kampanye Soekarno dan tokoh nasionalis lainnya, dianggap membahayakan kedudukan kolonial, karena itu, Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap. Ini terjadi pada tahun 1929. Tidak lama setelah itu, PNI malah dibubarkan sendiri oleh tokohnya, Mr. Sartono. Pembubaran ini menyebabkan kelompok nasionalis terpecah menjadi dua, yakni kelompok pro, dan anti pembubaran.

Di Surabaya pada tanggal 21 September 1937, K.H. Mas Mansur (Muhammadiyah), K.H.A Wahab Chasbullah (NU), dan pemimpin-pemimpin Islam lainnya dari SI, Al-Irsyad, Al-Islam, Al-Islam (organisasi Islam lokal di Solo), Persyarikatan Ulama (Majalengka, Jawa Barat), dan lain-lain, telah berhasil

1. Al-Irsyad, dan Persyarikatan Ulama (Majalengka, Jawa Barat)

Setelah wafatnya Tjokroaminoto, tahun 1934, SI mengalami perpecahan, maka lahirlah Partai Islam Indonesia (PII) pada tahun 1938 di bawah pimpinan Dr. Sukiman Wirjosandjojo. Tokoh-tokoh modernis seperti Mohammad Natsir, Abdul Kahar Muzakkir menyertai PII. Sedangkan H.A Salim membentuk Partai Penyardar, setelah berselisih dengan Abikusno Tjokrosujoso, pengganti Tjokroaminoto sebagai ketua SI (sejak 1930 SI berganti nama menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia/PSII).

Pada Maret 1942 Jepang menggantikan Belanda. Dalam perjalanannya Jepang menyadari bahwa dalam konteks Indonesia ulama sangat berpengaruh di masyarakat. Apa yang dikatakan oleh ulama, akan dituruti dengan sungguh-sungguh oleh simpatisannya. Menyadari hal ini, Jepang membubarkan MIAI, dan menggantikannya dengan Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Jepang tidak terlalu mengkhawatirkan Masyumi, karena ia *made in Japan*^{*}.

Pada 9 April 1945, BPUPKI, sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Jepang bersama masyarakat pra Indonesia untuk persiapan kemerdekaan diresmikan Anggota panitia dilantik pada 28 Mei, dan antara 29 Mei dan 1 Juni diadakan sidang-sidang pertama. Anggotanya mula-mula 62, kemudian ditambah 6 lagi hingga berjumlah 68. Menurut Prawoto Mangkusasmito, perimbangan kekuatan politik dalam BPUPKI adalah sebagai berikut : dari 68 anggota hanya 15 saja yang benar-benar mewakili aspirasi golongan Islam. Wakil-wakil dari Islam itu antara lain : K.H.A Sanusi (PUI), Ki Bagus Hadikusumo, K.H Mas Masjkur,

(NU), Sukiman Wirjosandjojo (PII sebelum perang), Abikusno Tjokrosojoso (PSII), Agus Salim (Penyadar sebelum perang), dan K.H. Abdul Halim (PUI). Selebihnya adalah orang-orang yang menolak Islam sebagai dasar negara. Ketua BPUPKI adalah Dr. Radjiman Wedyodiningrat, seorang mistik Jawa, sekalipun ketua formalnya adalah seorang Jepang. Perimbangan seperti ini, sebenarnya sekitar 20 persen saja yang mewakili aspirasi politik kelompok pendukung dasar Islam bagi negara yang hendak dibangun⁵.

Dalam BPUPKI, masalah yang dibahas antara lain berkisar pada persoalan bentuk negara, batas negara, dasar filsafat negara, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembuatan suatu konstitusi. Semua masalah di atas dibahas dengan lancar, kecuali pada dasar filsafat negara. Terjadi perdebatan tegang, dan panas dalam menentukan dasar negara. Tetapi akhirnya terjadi sebuah kompromi politik dalam bentuk Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta sebenarnya adalah sebuah pembukaan bagi konstitusi yang diajukan dalam sidang BPUPKI. Di dalamnya, Pancasila sebagai dasar negara telah disepakati; tapi sila pertama, yaitu sila Ketuhanan diikuti klausul:....dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun klausul ini tidak bertahan lama, sebab terjadi *deal* politik, di mana perwakilan ummat Islam menyetujui untuk menghapus klausul tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945.

Proklamasi kemerdekaan membawa angin segar bagi masyarakat untuk membentuk parpol. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh kalangan Islam, dengan membentuk parpol Masyumi, pada tanggal 7/8 Nopember 1945 di

⁵ *Ibid.* h. 102-109.

Yogyakarta. Masyumi yang berdiri ini, berbeda dengan Masyumi buatan Jepang. Tapi kelompok-kelompok penyokongnya sama. Bedanya terletak pada tidak adanya pihak eksternal non muslim yang mengontrol parpol ini, seperti waktu itu adalah Jepang⁵.

Sejalan perkembangan kondisi, terjadi perpecahan di Masyumi. PSII pada bulan Juli 1947 meninggalkan Masyumi. Kemudian tahun 1952 NU meninggalkan Masyumi, dan berganti dari *jami'iyah* (gerakan sosio-keagamaan) menjadi partai politik. Keluarnya NU sangat mengguncang Masyumi, pasalnya NU mempunyai basis yang kuat di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Dua daerah yang disebut pertama, dikenal sebagai daerah terpadat di Indonesia.

Tiga tahun setelah keluarnya NU dari Masyumi, diadakan Pemilu, yakni 29 September 1955. Tidak kurang dari 28 partai atau calon perorangan turut serta dalam pesta demokrasi itu. Hasilnya PNI, dan Masyumi mendapat kursi di parlemen sebanyak 57 kursi dari jumlah total 257; NU mendapat 45 kursi, PKI 39 kursi, sedangkan partai lainnya kurang dari 10 kursi. Setelah Pemilu usai, dibentuklah kabinet Ali-Roem-Idham (PNI-Masyumi, NU). Tapi usia kabinet ini tidak berjalan dengan optimal. Pada bulan Maret 1957 kabinet ini bubar.

Pada tanggal 2 Juni 1959, Majelis konstituante mengadakan pemungutan suara dalam rangka kembali ke UUD 1945. Hasil dari pemungutan suara tersebut :

263 setuju dengan usul presiden untuk kembali ke UUD 1945 sebagaimana 18

menginginkan anak kalimat Piagam Jakarta di masukkan ke dalam UUD 1945. dari hasil ini, kita tahu, ke dua kubu ini, sama-sama tidak memperoleh suara mayoritas mutlak (2/3) dari anggota yang hadir. Membaca kegagalan ini, Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang mengukuhkan kembali UUD 1945 dan pembubaran Majelis Konstituante, juga menandai hidupnya sistem politik Demokrasi Terpimpin⁷.

Kondisi ini, mempersulit gerak partai Islam. Soekarno menyatakan bahwa kelompok penghalang seperti itu disebut golongan kepala batu. Masyumi tidak layak hidup pada era Demokrasi Terpimpin. Kondisi ini semakin memanas, maka pada tanggal 20 Maret 1960 Soekarno membubarkan parlemen dan menggantikannya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR). Alasan Soekarno membubarkan parlemen karena, parlemen berani menolak Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pembubaran parlemen ini jelas bertentangan dengan UUD 1945 (lihat penjelasan UUD 1945 no. VIII)

Suhu politik yang semakin panas, menjadikan Masyumi dikucilkan dari DPRGR pada bulan April 1960. Selang empat bulan kemudian, Masyumi diperintahkan bubar. Alasan Soekarno membubarkan Masyumi, karena partai ini “sedang melakukan pemberontakan karena pemimpin-pemimpinnya turut serta melakukan pemberontakan-pemberontakan atau jelas telah memberikan bantuan,

Menurut penulis secara yuridis, keputusan Presiden tersebut salah, sebab para tokoh yang disebut dengan pemimpin-pemimpin oleh Presiden Soekarno, seperti Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, dan Burhanuddin Harahap tidak lagi menjadi pemimpin formal Masyumi. Karena itu, keputusan Presiden Soekarno lebih bersifat kepentingan politik pribadi, ketimbang sebagai sesuatu yang riil dalam ranah praksis.

Dua tahun kemudian terjadi transisi dari demokrasi parlementer menjadi demokrasi terpimpin (1959-1965). Pada tahun 1965 terjadi banyak demonstrasi di mana-mana. Kenaikan harga, dan inflasi yang tinggi menjadikan kekuasaan Soekarno tidak mampu bertahan lama lagi. Terjadi perubahan sosial, dan Soeharto menggantikan Soekarno menjadi presiden RI.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Soeharto bekerjasama dengan para teknokrat yang kebanyakan adalah para teknokrat sosialis, orang-orang katolik, abangan, nasionalis. Kelompok santri terlihat kurang dilibatkan. Ini terjadi karena kualitas sumber daya manusianya belum bisa bersaing dengan kelompok lainnya, yang lebih matang dalam konsep, dan teknik komunikasi.

Pada masa Soeharto ini, kelompok santri yang aktif berjuang diperlihatkan oleh para mahasiswa. Meski aktif berjuang, para mahasiswa ini belum matang secara wawasan, konsep, dan manajemen strategi. Hasilnya, para mahasiswa tidak dapat menembus dan mewarnai kekuasaan Orde Baru. Menurut mantan wakil presiden Mohammad Hatta melihat kelemahan umat Islam ketika itu terutama karena tidak mempunyai organisasi yang baik dan tidak pula memiliki konsepsi pembangunan yang jelas. Oleh karena itu, tidak mungkin kelompok ini

diharapkan bisa menegakkan ajaran Islam dengan baik dan berhasil membina kehidupan masyarakat dan negara⁹.

Di era Orde Baru, pada awalnya partai politik diberi kesempatan untuk bergerak. Namun, setelah diadakan Pemilu tahun 1971, di mana Golkar tampil sebagai pemenang pertama disusul dengan NU, Parmusi, dan PNI, agaknya mereka harus bersabar untuk tidak berandil besar dalam *decision making process*.

Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai¹⁰. Empat partai Islam yakni Nahdlatul Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai Syarikat Indonesia, dan Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan. Selain itu lima partai, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKU) bergabung menjadi Partai Demokrasi Pembangunan (PDI). Berikut data hasil Pemilu pada masa Orde Baru¹¹ :

Tabel 1.1
Data Hasil Pemilu Pada Masa Orde Baru

No	Partai	1977	1982	1987	1992
1	Golkar	232 (62.11%)	237 (64.30%)	299 (74.7%)	282 (70.5%)
2	PPP	99 (29.9%)	94 (27.8%)	61 (15.3%)	62 (15.5%)
3	PDI	29 (8.6%)	29 (7.9%)	40 (10%)	56 (14%)

Sumber: M.Rusli Karim, 1999 dalam buku *Negara, dan Peminggiran Islam Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana, h.46.

Kemenangan Golkar sebagai partai pemerintah, tidak dapat dilepaskan oleh menguatnya kekuatan negara, dan pelemahan partai-partai yang lain. Fusi yang dilakukan oleh pemerintah Orba, bertujuan untuk memudahkan kontrol pemerintah terhadap partai-partai politik. Selain itu, pemerintah Orba melakukan campur tangan dalam pemilihan ketua partai, penentuan azas, dan agenda politik. Hal ini dilakukan untuk menguatkan kekuatan negara, dan pelanggaran kekuasaan Soeharto.

Setelah 32 tahun kepemimpinan Orde Baru, terjadilah pergeseran politik, di mana terjadi suatu perubahan sosial. Orde Baru tumbang, dan digantikan Orde Reformasi. Perubahan ini membawa angin segar bagi mereka yang ingin mendirikan partai politik. Paska tumbangnya Orde baru, ratusan partai politik berdiri. Eforia demokrasi kembali terjadi seperti pada masa kemerdekaan.

Pada tahun 1999 diselenggarakan Pemilu. PDIP dibawah pimpinan Megawati Soekarno Putri dapat lolos sebagai pemenang. Kemenangan kubu Megawati menurut para analis tidak bisa dilepaskan dari peran media massa dalam membentuk image positif bagi Megawati. Keganasan kubu Suryadi dalam melakukan aksi-aksi politiknya kepada Megawati seolah-olah diterima dengan penuh kesabaran. Megawati juga dikenal sebagai sosok yang tidak banyak bicara. Selain itu figur bung Karno yang notabene adalah ayah kandung Megawati, dikenal masyarakat sebagai pemimpin yang dekat dengan wong cilik, dan strategi ini juga dimanfaatkan oleh Megawati untuk mencitrakan dirinya sebagaimana sang ayah pernah melakukannya.

Tabel 1.2
Data Peserta Pemilu 1999

No.	Nama Partai	Suara DPR	No.	Nama Partai	Suara DPR
1.	PDIP	35.689.073	23.	Krisna	369.719
2.	Golkar	23.741.749	24.	Partai KAMI	289.489
3.	PPP	11.329.905	25.	PUI	269.309
4.	PKB	13.336.982	26.	PAY	213.979
5.	PAN	7.528.956	27.	Partai Republik	328.564
6.	PBB	2.049.708	28.	Partai MKGR	204.204
7.	Partai Keadilan	1.436.565	29.	PIB	192.712
8.	PKP	1.065.686	30.	Partai SUNI	180.167
9.	PNU	679.179	31.	PCD	168.087
10.	PDKB	550.846	32.	PSII 1905	152.820
11.	PBI	364.291	33.	Masyumi Baru	152.589
12.	PDI	345.720	34.	PNBI	149.136
13.	PP	655.052	35.	PUDI	140.980
14.	PDR	427.854	36.	PBN	140.980
15.	PSII	375.920	37.	PKM	104.385
16.	PNI Front Marhaenis	365.176	38.	PND	96.984
17.	PNI Massa Marhaen	345.629	39.	PADI	85.838
18.	IPKI	328.654	40.	PRD	78.730
19.	PKU	300.064	41.	PPI	63.934
20.	Masyumi	456.718	42.	PID	62.901
21.	PKD	216.675	43.	Murba	62.006
22.	PNI Supeni	377.137	44.	SPSI	61.105

Sumber: H:\Pemilu 1999.htm

Lima tahun kemudian yakni pada tahun 2004 diselenggarakan Pemilu. Golkar tampil sebagai pemenang. Kemenangan Golkar menurut para analis sangat diuntungkan dengan buruknya kinerja kepemimpinan Megawati sebagai presiden. Dan kondisi ini dimanfaatkan oleh Golkar untuk mendulang suara, dan kembali menjadi pemimpin. Kerinduan masyarakat kepada Ordé Baru, dengan harga-harga

1. ... dengan harga yang relatif terjangkau

menjadi isu penting kenapa Golkar dianggap layak dipilih kembali oleh masyarakat. Mesin politik Golkar telah panas. Kader-kader Golkar bekerja dengan program yang sistematis, dan cerdas dalam memainkan isu. Selain itu, Golkar berupaya sebagai partai oposisi, yang seolah-olah berada pada pihak rakyat.

Berikut data hasil Pemilu 2004

Tabel 1.3
Peserta Pemilu 2004

No	Partai	Perolehan Suara	Prosentase	Jumlah Kursi	Asas
1	PNI Marhaenisme	923,159	0,81	1	Marhaenise ajaran Bung Karno
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	636,397	0,56	0	Pancasila dan UUD 1945
3	Partai Bulan Bintang	2,970,487	2,62	11	Islam
4	Partai Merdeka	842,541	0,74	0	Pancasila
5	Partai Persatuan Pembangunan	9,248,764	8,15	58	Islam
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1,313,654	1,16	5	Pancasila
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672,952	0,59	0	Keadilan, Demokrasi, dan Kemakmuran
8	Partai Nasional Benteng Kemerdekaan	1,230,455	1,08	1	Marhaenisme Ajaran Bung Karno
9	Partai Demokrat	8,455,225	7,45	57	Pancasila
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1,424,240	1,26	1	Pancasila
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855,811	0,75	1	Pancasila
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	895,610	0,79	0	Islam
13	Partai Amanat Nasional	7,303,324	6,44	52	Pancasila
14	Partai Karya Peduli Bangsa	2,399,290	2,11	2	Pancasila
15	Partai Kebangkitan Bangsa	11,989,564	10,57	52	Pancasila
16	Partai Keadilan Sejahtera	8,325,020	7,34	45	Islam
		2.761.000	2.44	13	Islam

18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21,026,629	18,53	109	Pancasila
19	Partai Damai Sejahtera	2,414,254	2,13	12	Pancasila
20	Partai Golongan Karya	24,480,754	21,58	128	Pancasila
21	Partai Patriot Pancasila	1,073,139	0,95	0	Pancasila
22	Partai Sarikat Indonesia	679,296	0,60	0	Pancasila
23	Partai Persatuan Daerah	657,916	0,58	0	Pancasila
24	Partai Pelopor	878,932	0,77	2	Pancasila
	Jumlah	113.462.414	100%	550	

Sumber : Koirudin, 2004. *Profil Pemilu 2004*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 303

Jika kita melihat azas partai pada tabel 3 di atas, terdapat 5 partai yang berazas Islam, yaitu: Partai Bulan Bintang, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi. Dan terdapat 16 partai berazas Pancasila. Sedangkan 3 partai lainnya berazas Marhaenisme ajaran Bung Karno, dan Keadilan Demokrasi dan Kemakmuran.

Membaca perjalanan dan perolehan suara Pemilu di atas, sesungguhnya ada beberapa catatan kritis yang perlu kita telisik bersama. Yang pertama : Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya Islam. Yang kedua : Partai politik Islam belum pernah menjadi pemenang dalam Pemilu, padahal mayoritas pemilih di Indonesia beragama Islam. Yang ketiga : Indonesia adalah negara yang mengadopsi sistem demokrasi yang bentuknya diperjelas dengan adanya Pemilu dan partai politik

Yang Keempat dalam sejarah kepartaian di Indonesia, kita temukan peran penting kaum muda terdidik seperti generasi pra kemerdekaan, generasi 1945, generasi 1966, dan generasi reformasi dalam mengawal perjalanan pemerintahan,

Banyak kalangan menyebut mahasiswa dengan sebutan agen-agen perubahan. Meski secara kuantitas tidak terlalu besar, tapi kita tidak dapat menutup mata atas perubahan yang begitu besar dalam perpolitikan, seperti yang terjadi pada era penggulingan Orde Lama, dan Orde Baru yang dikawal oleh para mahasiswa.

Penulis mendapati bahwa terjadi polarisasi dalam melihat mahasiswa jika kita menggunakan perspektif ideologi. Menurut Graham C, Kinloch, Ideologi adalah " Argumen yang muncul dari pandangan dunia atau paradigma sosial yang digunakan sekelompok orang untuk menjustifikasi tindakan mereka."¹²

Lebih lanjut Kinloch mengatakan bahwa ideologi digunakan para proponennya untuk tujuan politik mereka. Dalam memperjuangkan tujuan politik, mereka cenderung memakai ideologi dan bukan memakai pandangan dunia atau paradigma.

Herbeith Feith seorang Indonesianis mengkategorikan pemikiran politik di Indonesia pada tahun 1945-1965 dalam lima aliran politik, yaitu Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokrat, dan Komunisme. Menurut Koirudin " Kategori pemikiran politik (ideologi) dalam berbagai bentuk kelompok parpol sebagaimana dipelajari Feith masih relevan digunakan."¹³

Dalam penelitian ini, penulis secara sederhana mengelompokkan pemikiran politik Feith dalam dua kategori, yakni Ideologi Islam dan non Islam. Penulis melihat bahwa hal ini tidaklah oversimplifikasi dalam memetakan ideologi dalam konteks Indonesia saat ini. Argumen tersebut dapat dibuktikan dari

¹² Graham C. Kinloch, *Menjadi Agama: Tiga Teori Sosial Hegemonik* Surabaya: IPAM, h. 10

perkembangan asas parpol pada Pemilu 2004, yang secara teks atau bukti dokumenter menunjukkan bahwa peta ideologi terpolarisasi dalam asas Islam dan asas Pancasila.(lihat tabel 2 di atas)

Membaca realitas tersebut penulis sangat tertarik akan entitas mahasiswa dalam melihat partai politik Islam yang sampai saat ini belum pernah menang dalam Pemilu. Penulis mendapati bahwa mahasiswa dapat menjadi kajian yang menarik dan penting dalam masalah pengetahuan, pemikiran, dan ranah praksis kepartaian di Indonesia dan relasinya dengan partai politik Islam yang belum pernah menang dalam Pemilu.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil studi kasus mahasiswa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pendidikan. Dengan mempertimbangkan terbatasnya sumber daya baik itu mencakup masalah dana maupun tenaga, maka penulis hanya mengambil sampel di tiga perguruan tinggi baik itu perguruan tinggi Islam, yakni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Suka), maupun perguruan tinggi umum yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM).

Pemilihan sampel mahasiswa UMY, UIN, diambil dengan mempertimbangkan visi keislaman yang ingin dibentuk oleh kedua universitas tersebut. Karena itu penulis memasukkannya dalam universitas bervisi Islam. Meski kedua universitas tersebut sama-sama bervisikan Islam, namun keduanya memiliki warna yang berbeda. Sebagai misal, UMY dikenal masyarakat sebagai universitas berbasis warga Muhammadiyah, walaupun di UMY sendiri

Tahrir, dan lain sebagainya. Berbeda dengan UMY, UIN Suka dikenal masyarakat sebagai universitas berbasis warga pesantren NU, walaupun di UIN Suka sendiri mahasiswanya berasal dari beragam corak seperti Muhammadiyah, Al-Ikhwan Al-Muslimun, dan lain sebagainya. Faktor ini menjadi alasan yang menarik untuk diteliti.

Pemilihan sampel mahasiswa UGM diambil dengan mempertimbangkan visi yang ingin dibentuk yakni berdasar Pancasila. Dengan demikian penulis berusaha mendapatkan sebuah gambaran yang cukup mewakili dan *balance* dalam melihat suatu permasalahan.

Selain pemilihan sampel, penulis juga membatasi dalam konteks pemilihan responden. Responden yang akan dijadikan sumber data adalah mahasiswa aktif angkatan 2004. Mengapa angkatan 2004? Setelah melakukan pra penelitian dan berkonsultasi dengan beberapa pihak, penulis mendapati bahwa angkatan 2004 adalah angkatan yang secara akademik paling intens di kampus. Hal ini berbeda dengan angkatan 2003, dan angkatan-angkatan di atasnya yang intensitas kehadiran di kampus sangat jarang. Angkatan 2003 ke atas pada umumnya telah menghabiskan mata kuliah wajib dan telah bebas teori. Karena itu kehadiran mereka di kampus pada umumnya hanya untuk berkonsultasi untuk tugas akhir. Dan mengapa tidak angkatan 2004 ke bawah? Angkatan 2004 ke bawah seperti angkatan 2005, 2006, 2007 secara usia akademik belum mendapat hak pilih pada pemilu 2004. Karena itu, pengetahuan, dan pengalaman mereka tentang pemilu dalam ruang konsultatif jika dibanding angkatan 2004 yang telah

B. Rumusan Masalah

Membaca realitas di atas, penulis tertarik pada sebuah rumusan masalah yakni “Bagaimana Persepsi Mahasiswa Terhadap Partai Politik Islam di Indonesia Pada Pemilu 2004 (Studi Kasus Mahasiswa UMY, UIN SUKA, UGM)?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1 Tujuan Penelitian :

- a. Mengetahui sejauh mana persepsi mahasiswa UMY, UIN SUKA, UGM terhadap keberadaan partai politik Islam di Indonesia
- b. Mengetahui sejauhmana ketertarikan mahasiswa UMY, UIN SUKA, UGM terhadap partai politik Islam di Indonesia.

2 Manfaat Penelitian :

- a. Dapat menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai partai politik Islam di Indonesia.
- b. Dapat digunakan oleh partai-partai politik Islam guna mengetahui sejauhmana persepsi mahasiswa terhadap partai politik Islam di Indonesia, untuk kemudian dapat diaplikasikan dalam menggarap strategi, dan evaluasi bagi kemajuan partai politik Islam di Indonesia.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Persepsi

Dalam kerangka dasar teori ini, penulis akan mengutip beberapa pendapat para pakar. Setelah itu, penulis akan mencari intisari dari pendapat para pakar tersebut untuk kemudian dijadikan patokan dalam mengetahui definisi sebuah

teori yang akan digunakan dalam penelitian. Berikut ini, penjelasan para pakar mengenai persepsi :

Menurut Bimo Walgito persepsi adalah,

“Proses pengorganisasian terhadap stimulasi yang diterima oleh organisme atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integral dalam diri manusia.”¹⁴

Dikatakan bahwa persepsi itu merupakan aktivitas yang integral, hal ini mengandung arti bahwa seluruh pribadi, seluruh apa yang ada pada diri individu ikut berperan dalam terbentuknya persepsi.

Berbeda dengan Bimo Walgito, Saparinah Sadli mendeskripsikan persepsi dengan lebih jelas, yakni

“Suatu proses yang aktif dimana yang memegang peranan bukan hanya stimulus yang mengenalinya, tetapi ia juga sebagai keseluruhan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasinya dengan sikap-sikap yang relevan terhadap stimulasi tersebut.”¹⁵

Sedangkan Miftah Thoha memaknai persepsi sebagai

“Bentuknya dalam proses kognitif, yang dialami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasinya.”¹⁶

Secara lebih dalam, penulis melihat bahwa terdapat empat aspek yang dapat menjadi ciri dari persepsi :

Pertama, persepsi terbentuk oleh rangsangan-rangsangan yang bervariasi.
Kedua, persepsi bervariasi dari orang ke orang dan dari waktu ke waktu. Artinya persepsi individu bisa berbeda-beda, dan sebuah persepsi bisa berubah sejalan

¹⁴ Bimo Walgito, 1991. *Psikologi Sosial sebagai Pengantar*. Yogyakarta: Andi Offset, h. 54.

¹⁵ Saparinah Sadli, 1986. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta: LP3ES, h. 72.

dengan perjalanan waktu. *Ketiga*, persepsi bervariasi tergantung dari arah (fokus) alat-alat indera. Semakin kompleks alat indera yang menyerap rangsangan maka semakin cepat sebuah persepsi akan terbentuk. Dan *keempat*, persepsi cenderung berkembang ke arah tertentu dan sekali terbentuk kecenderungan itu biasanya akan menetap. Sebagai contoh, ketika sebuah partai berasaskan Islam, maka masyarakat akan cenderung membentuk persepsi bahwa parpol tersebut akan menegakkan Syariat Islam

Persepsi memiliki tiga dimensi yaitu : *pertama*, persepsi itu dilandasi oleh pengetahuan, atau apa yang kita ketahui (atau kita anggap tahu) tentang sesuatu itu, baik itu wujud lahiriah, perilaku, masa lalu, perasaan, motif, dan sebagainya. *Kedua*, pengharapan; gagasan kita tentang orang itu menjadi apa dan mau melakukan apa dipadukan dengan gagasan kita tentang seharusnya dia menjadi apa dan melakukan apa. *Ketiga*, evaluasi; kesimpulan kita tentang seseorang, didasarkan pada bagian mana seseorang (menurut pengetahuan kita tentang mereka) menjadi pengharapan kita tentang dia.

Pengharapan dan evaluasi, adalah merupakan dua unsur yang saling berkaitan. Seseorang mempunyai pengharapan akan orang lain atau kelompok lain karena ia mengetahui orang atau kelompok tersebut. Dan seseorang bisa memberikan penilaian tentang orang lain atau kelompok tersebut karena ia tahu dan mempunyai pengharapan terhadap orang atau kelompok tersebut.

Proses pemahaman melalui penglihatan, pendengaran, perasaan, sangat dipengaruhi oleh tiga variable yaitu : obyek atau peristiwa yang dipahami, tindakan terdapatnya persepsi dan orang-orang yang melakukan persepsi

Sub proses dalam persepsi ada tiga macam, yang menunjukkan sifat persepsi merupakan hal yang kompleks dan interaktif. Sub proses yang pertama adalah stimulus atau situasi atau obyek yang hadir. Selanjutnya adalah registrasi, interpretasi dalam masa registrasi, seseorang menerima informasi melalui penginderaan. Orang tersebut akan menerima semua informasi yang terdengar atau terlihat padanya lalu timbul interpretasi tergantung bagaimana seseorang melalui pendalaman, motivasi, dan kepribadian orang yang mempunyai persepsi. Sub proses yang terakhir yaitu umpan balik yang merupakan reaksi dari obyek persepsi.¹⁷

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan persepsi seseorang adalah :

(i) Psikologis

Yaitu kondisi psikis seseorang pada saat memberikan persepsi tentang suatu-obyek tertentu.

(ii) Keluarga

Persepsi seseorang pada umumnya dipengaruhi persepsi dari orang tua. Orang tua telah mengembangkan suatu cara yang khusus dalam memahami atau melihat kenyataan di dunia ini, banyak sikap dan persepsi-persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya.

¹⁷*Ibid.* h. 53.

(iii) Kebudayaan

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu merupakan salah satu faktor yang kuat yang mempengaruhi sikap, nilai, dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan dunia ini.

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses mental individu di dalam memberikan pandangannya terhadap sesuatu hal atau obyek. Sehingga menghasilkan sikap tertentu dalam diri individu yang bersangkutan. Kerena sikap individu-individu yang berbeda akan melihat hal yang sama dengan cara-cara berbeda. Dengan kata lain persepsi merupakan bentuk pola pikir seseorang dalam memahami suatu fenomena atau obyek tertentu secara subyektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan persepsi seseorang adalah psikologis, keluarga, kebudayaan.

2. Partai Politik Islam :

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat para pakar mengenai partai politik, fungsi partai politik, klasifikasi partai politik berdasar ideologi, orientasi keagamaan dan orientasi kepartaian, serta pengertian partai politik Islam, untuk kemudian ditarik definisinya.

Menurut Carl J. Friedrich partai politik adalah: “ *Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan materiil.*¹⁸”

R.H. Soltau : “ *Partai politik adalah sekelompok warga negara sedikit*

... dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih – bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.¹⁹”

Sigmund Neumann : *“Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan –golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.²⁰”*

Pasal 1 UU No 31/2002 mendefinisikan partai politik sebagai *“Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.”*

Setelah mengutip pendapat para pakar dalam pendefinisian mengenai apa itu partai politik. Penulis akan memaparkan apa saja fungsi dari partai politik itu sendiri :

(a) Komunikasi politik :

Komunikasi politik yang dilakukan oleh partai politik terdiri dari dua, yaitu menjaring aspirasi masyarakat dan mengaturnya, kemudian digabungkan. Inilah yang disebut dengan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Setelah digabung pendapat itu diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*).

(b) Sosialisasi politik :

Pada umumnya sosialisasi politik berlangsung secara berangsur-angsur. Karena itu dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses di mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada

Sosialisasi politik juga mencakup proses di mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di negara-negara baru, partai-partai politik juga berperan untuk memupuk identitas nasional dan integrasi nasional.

(c) Rekrutmen politik :

Dalam konteks rekrutmen politik, parpol dapat memanfaatkan rekrutmen politik untuk menambah stok kader. Hal ini juga akan bermanfaat bagi generasi muda untuk menyalurkan bakatnya dalam dunia politik, sehingga ada saluran yang membuatnya tidak bertindak anarkis. Selain itu rekrutmen politik berguna untuk mengembangkan jaringan. Semakin banyak anggota yang masuk maka akan memudahkan agenda-agenda partai politik terutama sekali untuk pertarungan pada masa-masa Pemilu. Di sisi lain, rekrutmen akan sangat membantu parpol dalam segi pendanaan.

(d) Pengatur konflik :

Konflik selalu terjadi dan ada di masyarakat, pemerintah, maupun di tubuh parpol sendiri. Karena itu yang paling urgen adalah parpol dapat menjadi sarana pengatur konflik di tubuhnya sendiri, kemudian dia dapat menjadi pengatur konflik di dataran yang lebih luas. Namun kerap terjadi parpol malah menjadi juru rekonsiliasi dalam tubuhnya sendiri. Karena itu hal ini kerap menjadi batu sandungan bagi parpol sendiri untuk dapat berfungsi sebagai sarana pengatur konflik di masyarakat, yakni menjadi sarana pengatur

Dalam pembahasan di atas, penulis telah memaparkan definisi, dan fungsi-fungsi dari partai politik. Berikut ini penulis akan memaparkan klasifikasi partai politik. Bila dilihat dari segi komposisi dan fungsi keanggotaan, secara umum parpol dapat dibagi dalam dua jenis yaitu partai massa dan partai kader.

Partai massa mengutamakan kekuatan jumlah anggota. Karena itu partai massa terdiri dari banyak aliran. Ideologi-ideologi yang berbeda dapat bernaung dalam satu wadah. Biasanya program yang diperjuangkan sangat luas dan kabur. Kelemahan dari partai massa adalah pada rawannya perpecahan, sebab partai massa terdiri dari banyak aliran yang ingin kepentingan-kepentingannya dapat diaplikasikan.

Berbeda dengan partai massa, partai kader mementingkan keketatan organisasi, dan biasanya kemurnian ideologi benar-benar dijaga. Bagi mereka yang menyeleweng dari garis partai akan dipecat.

Klasifikasi lain dari partai politik dapat dilihat dari segi sifat dan orientasi. Dalam perspektif ini partai dapat dibagi dalam dua jenis yaitu partai lindungan dan partai ideologi.

Partai lindungan pada umumnya memiliki organisasi nasional yang kendor, disiplin yang lemah, dan biasanya tidak terlalu mementingkan pemungutan iuran secara teratur. Partai jenis ini biasanya aktif pada masa-masa kampanye Pemilu. Kerja keras partai ini bertujuan untuk memenangkan anggota-anggota yang mencalonkan diri untuk menjadi wakil rakyat atau presiden.

Sedangkan partai ideologi atau partai azas mementingkan keketatan

Anggota partai jenis ini diwajibkan untuk memelihara ideologi dan

rekrutmen dengan penyaringan yang ketat. Untuk dapat menjadi ketua partai harus melalui beberapa tingkatan untuk dapat mendudukinya.

Jika pada bagian di atas penulis memaparkan mengenai klasifikasi parpol, maka pada tulisan berikut ini, penulis memaparkan orientasi keagamaan dan orientasi kepartaian dengan mengutip dari buku *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* karya Afan Gaffar mengenai orientasi keagamaan dan orientasi kepartaian²¹.

Tabel Gambar 1.1
Orientasi Keagamaan dan Kepartaian

Orientasi Keagamaan	Orientasi Kepartaian	
	Islam	Sekular
Santri	+	-
Abangan	-	+

Dari tabel di atas diketahui ada dua orientasi kepartaian, yakni Islam dan sekuler. Orientasi seperti yang telah disebutkan di atas tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Herbeith Feith yang mengkategorikan pemikiran politik di Indonesia pada tahun 1945-1965 dalam lima aliran politik, yaitu Nasionalisme Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokrat, dan Komunisme.

Dalam penelitian ini, penulis secara sederhana mengelompokkan pemikiran politik Feith dalam dua kategori, yakni Ideologi Islam dan non Islam. Penulis melihat bahwa hal ini tidaklah oversimplifikasi dalam memetakan ideologi dalam konteks Indonesia saat ini. Argumen tersebut dapat dibuktikan dari

²¹ Afan Gaffar, 2004, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Bandung: Pustaka

perkembangan asas parpol pada Pemilu 2004, yang secara teks atau bukti dokumenter menunjukkan bahwa peta ideologi terpolarisasi dalam asas Islam dan asas Pancasila. Berikut ini data peserta Pemilu 2004 beserta asasnya :

Tabel 1.4
Peserta Pemilu 2004

No	Partai	Perolehan Suara	Prosentase	Jumlah Kursi	Asas
1	PNI Marhaenisme	923,159	0,81	1	Marhaenise ajaran Bung Karno
2	Partai Buruh Sosial Demokrat	636,397	0,56	0	Pancasila dan UUD 1945
3	Partai Bulan Bintang	2,970,487	2,62	11	Islam
4	Partai Merdeka	842,541	0,74	0	Pancasila
5	Partai Persatuan Pembangunan	9,248,764	8,15	58	Islam
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	1,313,654	1,16	5	Pancasila
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	672,952	0,59	0	Keadilan, Demokrasi, dan Kemakmuran
8	Partai Nasional Benteng Kemerdekaan	1,230,455	1,08	1	Marhaenisme Ajaran Bung Karno
9	Partai Demokrat	8,455,225	7,45	57	Pancasila
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1,424,240	1,26	1	Pancasila
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	855,811	0,75	1	Pancasila
12	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia	895,610	0,79	0	Islam
13	Partai Amanat Nasional	7,303,324	6,44	52	Pancasila
14	Partai Karya Peduli Bangsa	2,399,290	2,11	2	Pancasila
15	Partai Kebangkitan Bangsa	11,989,564	10,57	52	Pancasila
16	Partai Keadilan Sejahtera	8,325,020	7,34	45	Islam
17	Partai Bintang Reformasi	2,764,998	2,44	13	Islam
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	21,026,629	18,53	109	Pancasila
19	Partai Damai Sejahtera	2.414.254	2.13	12	Pancasila

20	Partai Golongan Karya	24,480,754	21,58	128	Pancasila
21	Partai Patriot Pancasila	1,073,139	0,95	0	Pancasila
22	Partai Sarikat Indonesia	679,296	0,60	0	Pancasila
23	Partai Persatuan Daerah	657,916	0,58	0	Pancasila
24	Partai Pelopor	878,932	0,77	2	Pancasila
Jumlah		113.462.414	100%	550	

Sumber : Koirudin, 2004. *Profil Pemilu 2004*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 303

Ideologi

Jika pada bagian di atas penulis telah menguraikan orientasi keagamaan dan kepartaian, maka selanjutnya penulis membahas mengenai ideologi yang disarikan dari buku *Narasi Agung Tiga Teori Sosial Hegemonik* karya Zainuddin Maliki²².

Konsep ideology krap dipakai secara bergantian baik dengan pandangan dunia maupun paradigma, baik dalam pembahasan pengetahuan sosial maupun pengetahuan sehari-hari, dan beberapa penulis tidak mencoba membedakan di antara mereka. Alasan prinsipil dari percampuran konseptual semacam itu adalah bahwa ideology selalu muncul dari pandangan dunia atau paradigma sosial.

Sebuah ideology adalah argumen yang muncul dari pandangan dunia atau paradigma sosial yang digunakan sekelompok orang untuk menjustifikasi tindakan mereka, (Kinloch, 1981)

Dengan kata lain, pandangan dunia maupun paradigma sosial –terutama yang tersebut terakhir –dapat diubah menjad ideologi oleh sekelompok orang dan dimanfaatkan oleh mereka dengan maksud untuk menjustifikasi berbagai tindakannya.

Karakteristik Ideologi

Ideologi mempunyai karakteristik, yakni *Pertama*, ideology diformulasi dan ditaati oleh penganutnya dimaksudkan untuk tujuan tertentu. *Kedua*, ideology dipakai oleh para proponennya untuk tujuan politik mereka. Dalam memperjuangkan tujuan politik mereka cenderung memakai ideology dan bukan memakai pandangan dunia atau paradigma sosial.

Karl Mannheim, tokoh yang banyak membahas mengenai ideology juga mengidentifikasi dua tipe ideology yang berbeda. Ideology partikuler diciptakan oleh sekelompok masyarakat tertentu untuk menjustifikasi kepentingan dan perhatian mereka, sedangkan ideology total mengekspresikan mode berfikir yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, ideology partikuler biasanya muncul dari paradigma sosial spesifik, sedangkan ideology total pada umumnya merupakan ekspresi dari pandangan dunia yang luas yang menyebar di tengah-tengah kehidupan masyarakat serta membentuk pemikiran seluruh warganya. Oleh karena itu pemahaman terhadap ideology menjadi sangat kompleks.

Fungsi Ideologi

Mengapa orang menciptakan ideology dari pandangan dunia dan paradigma sosial, serta mengklaim menjadi “kebenaran yang pasti?” Jawaban parsial terhadap pertanyaan ini ada pada fungsi yang menyatakan bahwa ideology dibentuk untuk kepentingan manusia. Tiga fungsi penting bagi individu yakni :

... memahami makna, meniadakan kehidupan, dan menciptakan kepastian

Dalam hal ini, penulis tidak hanya menggunakan pemikiran dari Barat, tapi juga dari Indonesia. Dalam konteks ini, penulis akan mengutip pendapat dari Natsir, seorang praktisi dan ilmuwan muslim yang banyak berkecimpung dalam dunia politik dan da'wah :

Menurut Natsir *“Islam bukan semata-mata religi, yaitu agama dalam pengertian rohaniah saja. Islam mengatur hubungan antara manusia dan Allah, dan antara sesama manusia. Islam merupakan pedoman dan falsafah hidup yang tidak mengenal pemisahan agama dari politik. Menegakkan Islam tidak dapat dengan membiarkan pembinaan masyarakat dan negara dengan cara dan paham lain”*²³.

*“Yang dituju oleh Islam ialah agar agama hidup dalam kehidupan tiap-tiap orang, hingga meresap dalam kehidupan masyarakat serta dinyatakan dalam ketatanegaraan, pemerintahan, dan perundang-undangan. Tetapi dalam soal keduniaan, orang-orang diberi kemerdekaan mengemukakan pendirian dan suaranya dengan musyawarat bersama seperti dinyatakan firman Tuhan, “Dan hendaklah urusan mereka diputuskan dengan musyawarat”*²⁴.

“Hak dan kewajiban antara pemerintah dan rakyat juga telah jelas ditentukan oleh Islam. Pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat, dan bila mereka melaksanakan ini, mereka berhak akan ketaatan rakyat. Di samping itu, rakyat berhak menyelidiki dan mengoreksi, dan –bila tidak ada jalan lain- berhak mengingkari kekuasaan, yaitu bila kekuasaan ini melanggar ketentuan Allah.”

“Dalam parlemen suatu Negara Islam merdeka tidaklah perlu dipermusyawaratkan terlebih dahulu, apakah yang harus menjadi dasar pemerintahan, dan tidaklah mesti ditunggu keridhaan parlemen terlebih dulu, apakah perlu diadakan pembasmian arak atau tidak, apakah perlu diadakan penghapusan perjudian dan kecabulan apa tidak, apakah perlu diadakan pemberantasan khurafat dan kemusyrikan atau tidak.”

“Seorang Muslim pun, tidak dilarang meniru sistem yang dipergunakan oleh bukan Muslim selama sistem ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Suatu sistem yang baik bukan merupakan monopoli suatu bangsa atau negara. Ia menekankan sekali perlunya ijtihad ini serta kebebasan dalam bermusyawarah; adapun agama baru mencampuri soal bila permusyawaratan menjurus kepada pelanggaran moral keadilan dan kemanusiaan.”

“Sungguhpun Pancasila mengandung tujuan-tujuan Islam, Pancasila itu bukanlah berarti Islam. Bagi seorang sekularis, soal Ketuhanan, sampai kepada soal Ketuhanan Yang Maha Esa, tak ada hubungannya dengan wahyu; baginya soal Ketuhanan adalah soal ciptaan manusia yang berganti-ganti. Pancasila

sendiri itu hanya akan berarti bila dikaitkan dengan isu suatu ideologi. Tetapi karena Soekarno menempatkan Pancasila pada kedudukan netral terhadap semua ideologi, maka Pancasila itu kosong dari isi, katanya.²⁵”

Setelah memaparkan pendapat ilmuwan tentang partai politik, maka penulis mendefinisikan partai politik Islam di Indonesia sebagai organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia dengan asas Islam secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Adapun fungsi dari parpol Islam tidak berbeda dengan fungsi parpol seperti yang telah disebutkan di atas.

3. Mahasiswa :

Relasi Mahasiswa dengan Partai Politik

Dalam sejarah Indonesia, kita tidak bisa melupakan peran penting mahasiswa dalam melakukan perubahan sosial. Karena itu tidak mengherankan jika mereka dijuluki dengan “*agent of modernization*”, atau kadang disebut dengan “*agent of development*”.

Predikat semacam itu tentu merupakan harapan bagi banyak orang terhadap para mahasiswa. Namun, hal itu juga bisa dimaknai dengan tanggung jawab yang harus dipikul oleh mahasiswa sebagai tugas normatif dari ekspektasi masyarakat. Pada masa pra dan paska kemerdekaan, peran kaum muda terdidik dalam bidang politik sangat signifikan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, terdapat dua jalan yang pada umum ditempuh oleh para mahasiswa terutama bagi mereka yang tertarik pada politik. Hal ini bisa diamati sejak aktivitas mahasiswa marak di tahun 1990. Saat

itu bentuk aktivitas dibagi dua, yaitu kelompok studi dan gerakan. Mantan aktivis kelompok studi sekarang banyak yang berada di lembaga-lembaga penelitian.

Mantan aktivis gerakan itu sendiri dibagi dua lagi, yaitu yang percaya dan tidak percaya kepada parpol. Mereka yang percaya kepada parpol sekarang banyak yang menjadi aktivis parpol, seperti Budiman (PDI-P), Rama Pratama (PKS), dan Anas Urbaningrum (Partai Demokrat). Mereka yang tidak percaya kepada parpol umumnya memilih aktif di lembaga swadaya masyarakat.

Pemilahan antara aktivis dan pemikir di atas sangat terlihat, terutama pada tahun 1990-an. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, coraknya sangat berbeda, terutama pada masa awal kemerdekaan. Pada masa itu mereka yang masuk kategori pemikir juga menjadi aktivis di lapangan, mereka ini antara lain: M.Hatta, Natsir, Soekarno, Tjokroaminoto, dan masih banyak yang lain.

Dari lintasan sejarah di atas kita ketahui bahwa peran mahasiswa dalam bidang politik mempunyai sejarah yang panjang. Karena itu relasi antara mahasiswa dengan parpol terdapat hubungan yang erat dan saling mewarnai. Tidak saja dalam peran mahasiswa sendiri dalam perpolitikan di Indonesia, tapi juga entitas parpol yang memberikan tempat bagi para kaum muda terdidik tersebut. Para cendekiawan seperti Lewis Coser dan Alfian Darmawan memberikan definisi tersendiri bagi mahasiswa :

Lewis Coser mengatakan : *“Orang-orang yang kelihatannya tidak pernah menerima kenyataan sebagaimana adanya. Mereka mempertanyakan kebenaran yang berlaku pada suatu saat, dalam hubungannya dengan kebenaran yang lebih tinggi dan lebih luas. Sementara itu Edward Shils memberikan ciri pada mahasiswa dengan sebutan “Orang-orang yang mencari kebenaran.”*²⁶

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Alfian Darmawan memberikan perspektif yang berbau normatif dan praksis terhadap mahasiswa dengan statement:

“Mahasiswa tidak boleh diwarnai oleh adanya ‘vested interest’. Oleh karena itu setiap tindakan atau gerakan yang dilakukannya adalah harus berdasar komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Sebab adalah suatu tindakan yang absurd (atau bahkan keliru) jikalau orang menginginkan keterputusan dan keterasingan mahasiswa dengan masyarakat.”²⁷

“Selain itu, sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya era globalisasi dunia, dan semakin derasnya dorongan untuk terciptanya iklim keterbukaan, maka keinginan kuat dari kalangan mahasiswa sebagai bagian dari suatu masyarakat akademis untuk mempercepat terwujudnya keterbukaan dan juga iklim yang lebih demokratis, seringkali menjadi salah satu sumber ketegangan antara dunia akademis dan para politisi pemegang kekuasaan.”²⁸

Membaca pikiran para ahli di atas, tampak sekali atmosfer nilai-nilai normatif yang kadang kerap dikritik sebagai sesuatu yang tidak antroposentris atau membumi. Argumen yang menjadi landasannya adalah bahwa tidak dapat dipisahkan antara kehidupan mahasiswa sebagai makhluk sosial dengan dunia sosial termasuk di dalamnya adalah sebagai anggota partai atau organisasi tertentu. Dalam hal ini saja mahasiswa tidak bisa melepaskan diri dari berbagai unsur kepentingan seperti yang dipesankan oleh Alfian Darmawan di atas.

Sedangkan penyebutan mahasiswa sebagai sosok yang mencari kebenaran adalah sesuatu yang relatif untuk dilihat dalam perspektif yang multikultural seperti dalam konteks ke Indonesiaan. Karena itu ciri-ciri di atas lebih bersifat normatif dan berbau pesan moral ketimbang sesuatu yang mudah dilihat dan diketahui secara lahiriah. Jika demikian, definisi mahasiswa menjadi kabur. Sebab

tidak disebut mahasiswa jika tidak mencari kebenaran

Setelah membaca pendapat-pendapat di atas dan memahami argumen dari para cendekiawan, penulis memberikan definisi mahasiswa dengan : individu yang masih tercatat secara prosedural sebagai orang yang masih belajar di universitas baik itu mahasiswa aktif maupun sedang cuti.

4. Pemilu

Sistem Pemilu 2004²⁹

Pemilihan Umum 2004 adalah Pemilu dengan sistem baru. pemilu tersebut tidak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana Pemilu-pemilu sebelumnya, tapi juga untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sehingga ada dua Pemilu 2004, yakni Pemilu untuk Anggota DPR dan DPRD di satu sisi, dan Pemilu untuk Anggota DPD di sisi lain.

Kedua sistem tersebut menggunakan sistem berbeda. Untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Sistem ini memungkinkan bagi pemilih untuk secara terbuka mengetahui daftar nama caleg yang dijagokan oleh Parpol peserta Pemilu.

Surat sura Pemilu dalam sistem ini di samping akan memuat nomor dan tanda gambar Parpol peserta Pemilu juga akan menampilkan daftar caleg untuk setiap daerah pemilihan. Dengan demikian pemilih tidak saja akan dapat menentukan pilihannya pada salah satu Parpol peserta Pemilu, tapi sekaligus juga memilih salah satu caleg yang diajukan oleh Parpol.

Daerah Pemilihan

Hal baru yang juga diusung oleh Pemilu 2004 adalah diintrodukirnya daerah pemilihan. Daerah pemilihan merupakan daerah yang ditetapkan sebagai daerah perebutan kursi DPR/DPRD. Setiap daerah pemilihan akan memperebutkan 3-12 kursi. Maksud dari pembentukan daerah pemilihan tersebut adalah untuk mendekatkan antara pemilih dengan calon yang akan dipilihnya.

Masing-masing tingkat perwakilan mempunyai cakupan wilayah daerah pemilihan yang berbeda. Daerah pemilihan DPR adalah provinsi atau bagian-bagian provinsi. Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah Kabupaten /Kota atau gabungan Kabupaten/Kota. Sedangkan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Kecamatan atau gabungan Kecamatan.

Sehingga kontrak sosial para caleg lebih jelas, khususnya dalam hal perjuangan kepentingan konstituen yang akan diwakilinya. Bagi DPR Kabupaten/ Kota misalnya, karena ia dipilih oleh konstituen yang berasal dalam satu kecamatan atau gabungan kecamatan, maka ia harus memperjuangkan kepentingan masyarakat yang berada dalam daerah pemilihan di mana ia berasal.

Peserta Pemilu

Dalam Pemilu 2004 dikenal dua macam peserta Pemilu. Untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota pesertanya adalah Partai Politik. sedangkan untuk memilih anggota DPD pesertanya adalah perseorangan. Implikasi dari kombinasi perbedaaan sistem Pemilu 2004 membuat adanya kombinasi cara pemungutan suara. Surat suara DPR/DPRD berisi nomor, tanda gambar Parnol dan nama calon untuk setiap daerah pemilihan. Pemberian

suara dengan cara mencoblos satu tanda gambar. Parpol dan nama satu calon di bawah tanda gambar Parpol.

Sedangkan surat suara DPD berisi nomor, nama, dan foto calon perseorangan anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan (provinsi). Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos salah satu gambar/foto calon anggota DPD dalam surat suara.

Penentuan Kursi

Sedangkan untuk menentukan perolehan kursi masing-masing parpol terlebih dahulu akan ditentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) BPP akan diperoleh dengan cara membagi jumlah suara yang sah dengan jumlah kursi yang diperubutkan. Suara sah yang diperoleh parpol dibagi BPP sama dengan perolehan kursi parpol.

Calon yang berhak memperoleh kursi DPR/ DPRD adalah calon yang mencapai angka BPP, atau yang tidak mencapai angka BPP, tapi terpilih berdasarkan pada daftar nomor urut. Akibatnya, calon yang hampir mendekati BPP, karena berada dalam urutan bawah dapat dikalahkan oleh calon dengan perolehan suara sangat kecil, karena calon terakhir menempati ranking atas.

Pengawasan Pemilu

Untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu, maka dibentuklah Panwaslu. Lembaga ini bertujuan untuk : pertama, mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kedua, menerima laporan pelanggaran peraturan

penyelenggaraan Pemilu, dan keempat, meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi berwenang.

Faktor yang Mempengaruhi Kemenangan Pemilu

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemenangan Pemilu. Faktor-faktor tersebut antara lain³⁰ :

1. Isu dan kebijakan politik: Isu dan kebijakan yang menarik bagi segmen yang akan dibidik oleh parpol menjadi hal yang penting. Sebab hal ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemilih. Yang termasuk komponen ini antara lain: kebijakan ekonomi, kebijakan luar negeri, kebijakan dalam negeri, kebijakan sosial, kebijakan politik, dan keamanan, kebijakan hukum, dan karakteristik kepemimpinan.
2. Citra Sosial : Citra sosial adalah suatu bentuk persepsi yang dibentuk atau terbentuk berdasarkan banyak faktor , antara lain :

Demografi

- Usia (contoh : partai orang muda)
- Gender (calon pemimpin dari kaum hawa)
- Agama (partai politik Islam atau Katolik)

Sosio Ekonomi

- Pekerjaan (contoh : partai kaum buruh)
- Pendapatan (contoh : partai wong cilik)

Kultural dan Etnik

- Kultural (contoh : kandidat presiden yang bisa nyanyi)

-Etnik (contoh : partai orang Jawa)

Politis Ideologis (contoh : partai nasionalis, partai agamis, partai konservatif, partai moderat)

3. Perasaan emosional : perasaan emosional akan muncul oleh policy politik yang ditawarkan. Misalnya seorang kandidat menawarkan policy mengirimkan pasukan elite untuk menumpas gerakan separatis, hal ini akan memunculkan perasaan emosional berupa makna patriotic, tegas dan sungguh-sungguh.
4. Citra Kandidat : mengacu pada sifat-sifat pribadi yang dianggap sebagai karakter kandidat. Beberapa sifat yang merupakan citra kandidat yaitu, artikulatif, welas asih, stabil, energik, jujur, tegar, dan sebagainya.
5. Peristiwa mutakhir : secara umum peristiwa mutakhir terbagi menjadi dua, yaitu masalah domestik, dan luar negeri. Untuk masalah domestik terdiri dari : tingkat inflasi, prediksi ekonomi, gerakan separatis, ancaman keamanan, merajalelanya korupsi, dan sebagainya. Sedangkan masalah luar negeri misalnya perang antara negara-negara tetangga, invasi sebuah negara ke negaera lain, dan contoh lainnya yang mempunyai efek langsung maupun tidak langsung kepada calon pemilihnya.
6. Peristiwa personal : menyangkut masalah yang berhubungan dengan kehidupan pribadi oleh seorang kandidat misalnya skandal seksual, skandal bisnis, menjadi korban rezim tertentu, menjadi tokoh perjuangan tertentu, ikut bermerang untuk mempertahankan tanah air

7. Faktor-Faktor epistemik : meliputi isu-isu yang memancing keinginan publik mengenai hal-hal yang baru.

E. Definisi Konseptual :

Definisi konsep merupakan usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya agar tidak terjadi kesalah pahaman. Adapun definisi konseptual yang digunakan adalah :

1. Persepsi : Bentuk pola pikir seseorang dalam memahami suatu fenomena atau obyek tertentu secara subyektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan persepsi seseorang adalah faktor psikologis, keluarga, dan budaya.

2. Persepsi terhadap Partai Politik Islam : Bentuk pola pikir seseorang dalam memahami partai politik Islam.

3. Partai Politik Islam : Organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia dengan asas Islam secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

4. Mahasiswa : Individu yang masih tercatat secara prosedural sebagai orang yang masih belajar di universitas baik itu mahasiswa aktif maupun sedang cuti.

5. Pemilu 2004 : Pemilu yang tidak hanya untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana Pemilu-pemilu sebelumnya, tapi juga untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

F. Definisi Operasional

1. Sejarah Partai Politik Islam di Indonesia Pada Pemilu 2004
2. Fungsi Partai Politik Islam di Indonesia Pada Pemilu 2004
3. Keterlibatan Mahasiswa Baik itu Secara Psik/struktural, dan Emosional Terhadap Partai Politik Islam di Indonesia Pada Pemilu 2004
4. Ideologi Partai Politik Islam di Indonesia Pada Pemilu 2004.
5. Tokoh-tokoh Partai Politik Islam di Indonesia Pada Pemilu 2004.
6. Visi, Misi, Tujuan Partai Politik Islam di Indonesia Pada Pemilu 2004.
7. Pendekatan Partai Politik Islam di Indonesia Pada Pemilu 2004 Pada Masyarakat.
8. Hubungan Antar Partai Politik Islam di Indonesia Pada Pemilu 2004.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian :

Dalam penulisan karya ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah metode yang mencari pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, dan kemudian dianalisis³¹.

2. Lokasi Penelitian :

Lokasi penelitian dilakukan di tiga universitas yakni :

³¹ Hadari Nawawi, 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, h.32.

- a. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang beralamat di Jl.Lingkar Barat, Tamantirto, Yogyakarta 55183
- b. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang beralamat di JL.Marsda Adi Sucipto, Yogyakarta 55281.
- c. Universitas Gadjah Mada yang beralamat di Bulaksumur, Yogyakarta – 55281

3. Populasi dan Sampel :

Dalam melakukan penelitian ini, penulis hanya mengambil sebagian saja dari keseluruhan populasi yang ada di tiga universitas (UMY, UIN Suka, UGM) dan sampel yang digunakan adalah mahasiswa aktif angkatan 2004. Adapun teknik pengambilan sampel menggunakan *non probability sampling*, yakni *accidental sampling*, sampel yang diambil dari siapa saja yang kebetulan ada. Penggunaan metode ini dipilih karena mempertimbangkan keefektifan praktik di lapangan. Berikut data mahasiswa tiga universitas tersebut :

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	: 1,949
Universitas Islam Negeri Suka	: 1,535
Universitas Gadjah Mada	: 8,725
Total	: 12,209

Penulis memperkecil unit analisa dengan melakukan penarikan sampel. Karena apabila semua populasi dalam unit analisa diteliti tentu memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang relatif besar.

Menurut Kartini Kartono, pada prinsipnya tidak ada aturan ketat berapa besarnya sampel yang harus diambil dari populasi³² Tapi ada juga yang menyarankan untuk mengambil sampel sebesar 10% dari populasi, ini hanya sebagai aturan kasar. Namun bila populasinya terlalu besar maka presentasinya dapat dikurangi. Semakin besar sampel akan semakin representatif. Namun pertimbangan efisiensi sumber daya akan membatasi besarnya jumlah sampel yang akan diambil³³.

Setelah membaca beberapa pendapat di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada aturan baku dalam pengambilan sampel. Namun perlu diketahui, dengan semakin banyaknya sampel yang diambil, semakin mewakili dari sebuah populasi.

Setelah melakukan pra penelitian dan mengetahui jumlah mahasiswa tiga universitas tersebut maka penulis akan mengambil 2,5% dari jumlah populasi, yakni 305 orang. Sampel diambil dari angkatan 2004 yang masih aktif tercatat sebagai mahasiswa di tiga universitas tersebut.

4. Data dan Sumber Data :

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yakni :

a. Sumber data langsung (primer), yakni data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu responden. Selain itu penulis juga meminta langsung data jumlah mahasiswa yang akan diteliti lewat biro akademik masing-masing universitas.

³² Kartini Kartono, 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, h. 135.

³³ Kartini Kartono, 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, h. 135.

b. Sumber data tidak langsung (sekunder), yakni data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Dalam hal ini berupa data dari buku, internet, dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data :

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara dilakukan terhadap sebagian responden untuk memastikan kebenaran data dalam isian kuesioner dan mengembangkan analisis. Penulis juga mewawancarai pihak-pihak yang berwenang seperti pegawai biro akademik guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian.

b. Teknik Kuesioner, teknik pengumpulan data dengan menyerahkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden³⁴. Peneliti akan mengumpulkan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis, dan jawaban ditulis oleh responden sendiri. Dalam hal ini responden akan membaca pertanyaan, menginterpretasikan kemudian menuliskan jawabannya. Sedangkan jenis pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan semi terbuka sehingga jawaban sudah tersusun tetapi masih terdapat kemungkinan jawaban.

c. Teknik Dokumentasi, yakni teknik pengumpulan data melalui berbagai dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik itu berupa buku, internet, dan lain sebagainya.

d. Observasi, penulis melakukan pengamatan terhadap obyek yang diteliti, seperti lokasi penelitian di UMY, UIN Suka, dan UGM.

³⁴ 1995, 164-171. 1997, 57

6. Teknik Analisis Data :

Dalam menganalisis data, metode yang digunakan menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif. Metode ini diambil untuk memperoleh gambaran khusus yang bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam permasalahan yang diteliti yang dilakukan pada waktu pengumpulan data. Dalam teknik ini, setelah data diperoleh melalui tiga macam cara teknik pengumpulan data yaitu wawancara, kuesioner, dokumentasi, dan observasi. Kemudian dilakukan analisis sesuai dengan gejala-gejala yang diteliti dan diinterpretasikan berdasarkan teori yang ada

Teknik analisa data yang digunakan mengikuti saran Miles dan Habermas³⁵ terutama teknik analisis dengan model analisis interaktif, yaitu analisis yang bergerak pada tiga komponen: a. reduksi data, b. Sajian data, dan c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi.

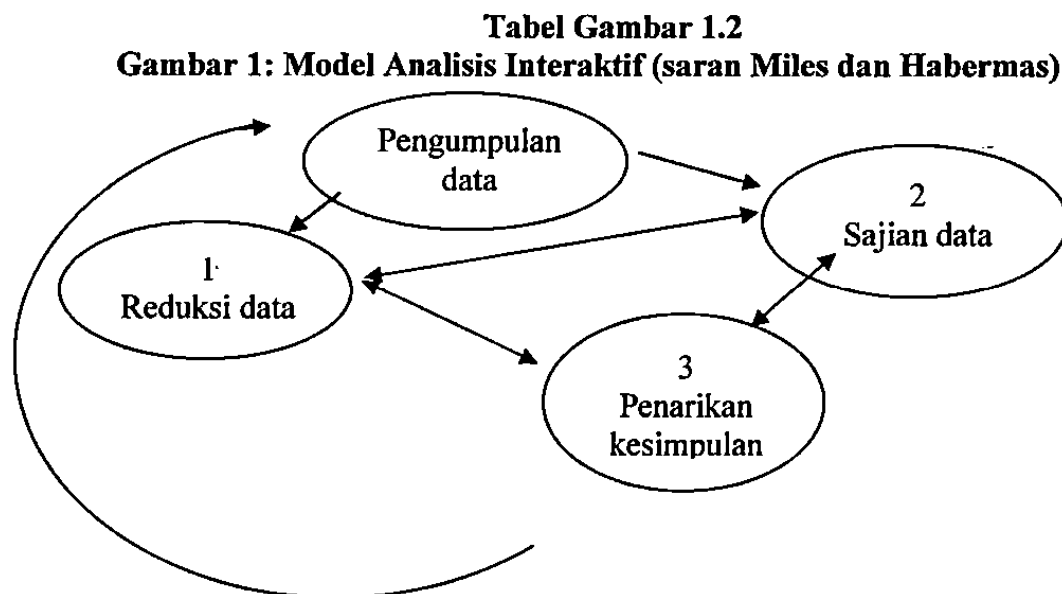
a. Reduksi data yang dimaksud adalah dengan melakukan proses menyeleksi, mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Sajian data meliputi meliputi jenis matriks, gambar atau skema, jaringan kerja, keberkaitan kegiatan, dan table. Kesemuanya dilakukan untuk dapat merakit informasi secara teratur supaya dapat dilihat dan dimengerti dalam satuan bentuk yang kompak (menyeluruh).

³⁵ Brita Mikkelsen, 2001. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Studi Kasus*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 15

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah kegiatan analisis yang dilakukan setelah reduksi data dan sajian data dibuat atau disusun. Karena penelitian kuantitatif analisis datanya setiap saat dimulai sejak peneliti mulai mengumpulkan data sampai perolehan data itu dirasa cukup, maka tidak ada kesimpulan akhir yang baku sebelum proses pengumpulan data secara keseluruhan selesai atau cukup.

Hubungan interaktif antar ketiga komponen tersebut dapat digambarkan dalam gambar berikut :



Sumber: Mikkelsen, Brita, 2001

Untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap parpol Islam di Indonesia pada Pemilu 2004, penulis menggunakan metode analisa indeks.

Rumusnya :

$$(f_{or4}) + (f_{or3}) + (f_{or2}) + (f_{or1})$$

N = jumlah populasi

fa = frekuensi yang menjawab option a

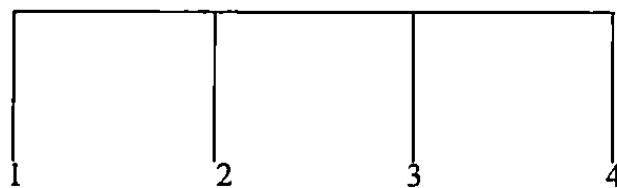
fb = frekuensi yang menjawab option b

fc = frekuensi yang menjawab option c

fd = frekuensi yang menjawab option d

indeks tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel Gambar 1.3



Untuk mendapatkan kategori digunakan rumus interval indeks

$$I = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Jumlah Skor}}$$

$$I = \frac{4-1}{4} = 0,75$$

Keterangan untuk kategorinya :

1.00 - 1.75 : Kategori Tidak Baik

1.76 - 2.50 : Kategori Kurang

2.51 - 3.25 : Kategori Cukup

3.26 - 4.00 : Kategori Baik